

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Namun pada realitanya pembangunan yang sudah berjalan saat ini secara keseluruhan belum dapat dinikmati oleh sebagian rakyat Indonesia. Sehingga, menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya kemiskinan, yang salah komponen menurunnya kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan kemiskinan dan pembangunan yang cukup kompleks ini membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal.

Yuni (2008:2:vol 1) mengatakan bahwa Masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut, tetapi juga melibatkan masalah-masalah sosial yang ada di pedesaan”.

Salah satu cara yang ditempuh mengatasi kemiskinan adalah memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu meningkatkan komunitas pedesaan, sehingga mampu mengenali potensi-potensi

yang ada, mendayagunakan secara optimal untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam pemeliharaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan serta pengembangan hasil-hasil pembangunan merupakan salah satu kunci dari setiap upaya pembangunan, sebab pembangunan tanpa partisipasi masyarakat hanya menimbulkan ketergantungan masyarakat sehingga mereka menjadi obyek dalam proses pembangunan.

Menurut Abdullah (2006:57) Konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau keadaan tertekan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan, atau ketiadaan otoritas, keterpinggiran, ketersisihan, kebangktan, dari kekalahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan/*powerless*. Dengan diberdayakan diharapkan dapat memberikan energi dan kekuatan baru untuk dapat mereposisi status lemah menjadi setara dan sejajar dengan status yang diharapkan

Didaerah kelurahan ada banyak program pemberdayaan dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan memajukan pembangunan di kelurahan antara lain program P2KP, penyaluran dana BLT dan Raskin. Indikator yang dipakai untuk menentukan rakyat miskin berpatokan pada kriteria yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bagian Dinas Statistik antara lain :

- (1):penggunaan air minum;
- (2) pakaian;
- (3) penggunaan bahan bakar;
- (4) kebutuhan makan;
- (5) tipe rumah;
- (6) jenis jamban;
- (7) jenis lantai;
- (8) konsumsi daging;
- (9) luas lantai
- (10) pendidikan;
- (11) dan penerangan.

Dari kesebelas indikator diatas maka pemerintah (Lurah) menentukan siapa saja masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan miskin(bantuan dari kelurahan). Misalnya ada bantuan Raskin, BLT, P2KP, dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri). Dalam hal ini penulis secara khusus membahas tentang PNPM (Program nasional Pemberdayaan Masyarakat).

PEMKOT Medan (2013:20) Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Nasional Serta PNPM wilayah Khusus dan desa tertinggal PNPM adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

DIRJEN Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2008:1)) Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat terutama

masyarakat miskin yang ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan lagi obyek melainkan sebagai subyek penanggulangan kemiskinan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) adalah kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini berupaya menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas. Pengembangan

kapasitas masyarakat adalah bentuk dari upaya pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar dapat berperan serta aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Kebijakan pemerintah melalui program PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu upaya memberikan solusi untuk menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Tegal Sari Mandala III dengan sasaran 15 Kepala Lingkungan yang menempatkan masyarakat sebagai obyek dan sekaligus sebagai subjek pembangunan untuk selanjutnya masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, memiliki rasa peduli dan semangat partisipatif yang utuh dan menyeluruh dalam berbagai sektor dan proses pembangunan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peran Lurah dalam penyaluran dana PNPM di Kelurahan tegal Sari Mandala III Medan.
- 2) Peran Lurah dalam menanggulangi kemiskinan di kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan.
- 3) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyaluran dana PNPM di Kelurahan Tegal Sari Mnadala III Medan.
- 4) Kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam kebijakan yang dilakukan pemerintah.
- 5) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tetap banyak berada di angka kemiskinan.

C. Batasan Masalah

Melihat banyaknya masalah yang dapat muncul dari penelitian ini dan mengingat keterbatasan penulis, maka penulis membuat pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu:

- 1) Peran Lurah Dalam Penyaluran Dana PNPM di Kelurahan Tegal Sari Mandala III.
- 2) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyaluran dana PNPM di Kelurahan Tegal Sari Mnadala III Medan.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Peran Lurah Dalam Penyaluran Dana PNPM di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan ?
- 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran dana PNPM di Kelurahan tegal Sari Mandala III Medan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui peran Lurah dalam penyaluran dana PNPM di kelurahan tegal sari mandala III.
- 2) Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penyaluran dana di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Medan.

- 3) Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan di Kelurahan Tegal Sari Mandala III.

F. Manfaat Penelitian

Adapun mamfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi penulis, sebagai pengalaman dan masukan guna meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang Peran Lurah dalam penyaluran Dana PNPM.
- 2) Bagi Instansi sebagai bahan masukan bagi pihak Lurah dalam penyaluran dana PNPM di Kelurahan Tegal Sari Mandala III sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Kelurahan Tegal Sari Mandala III.